

DIALOG 50 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Bahasaku Bahasa Indonesia

WAHYUNI RIZKIANA KAMAH
Pengamat bahasa

Dalam kurun waktu 50 tahun Indonesia merdeka, kita patut prihatin dengan nasib perkembangan bahasa Indonesia yang telah dicanangkan sebagai bahasa persatuan sejak 28 Oktober 1928.

Imperialisme bahasa asing, terutama Inggris, bukanlah ungkapan yang berlebihan untuk menggambarkan betapa kuatnya pengaruh bahasa tersebut di hampir seluruh bidang. Dari pariwisata, film hingga ilmu dan teknologi, seluruhnya dikuasai bahasa Inggris. Bukan itu saja, nama-nama kompleks hunian megah di sekitar Jakarta maupun nama-nama toko di pusat-pusat perbelanjaan hampir seluruhnya menggunakan bahasa asing.

Dalam pemakaian sehari-hari terutama di kota besar seperti Jakarta, bahasa Indonesia seperti anak tiri, kehadirannya diabaikan. Di tengah-tengah arus globalisasi, kala pusat-pusat kursus bahasa asing (baca: Inggris) mengganda dengan cepat seperti cendawan di musim hujan, banyak orang Indonesia bercakap-cakap dengan

campuran bahasa Inggris. Umumnya, alasan mereka adalah karena kesulitan mencari padanan kata yang sesuai atau belum ada dalam bahasa Indonesia. Tidak mustahil sikap seperti itu sekadar untuk gagah-gagahan saja. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari pun yang sering terdengar bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa pasaran.

Tantangan bagi Bahasa Indonesia bukan itu saja. Kata-kata serapan asing dari waktu ke waktu jumlahnya semakin membengkak, menambah perbendaharaan kata bahasa sendiri. Menghadapi 'serangan' itu, kita agak ketinggalan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalaupun padanan itu sudah ada, masyarakat masih malu-malu untuk memakainya.

Ganjalan yang dihadapi bahasa Indonesia yang cukup berat adalah penggunaan *eufemisme*. Gejala *eufemisme* itu telah lama ada dan pemakaiannya lambat laun akan menggerogoti cara bernalar pemakai bahasa Indonesia. Tuna wisma (gelandangan), wanita tuna susila (wanita pelacur), rawan pangan (kelaparan), praja-sejahtera (miskin) adalah beberapa

bentuk eufemisme yang mulai dibakukan. Bayangkan, bila sebagian besar "kenyataan pahit" selalu dicari bentuk halus — seperti pelacur disebut tuna wisma, itu berarti kita sedang belajar mengingkari kenyataan, suatu kemunduran bagi bangsa yang sudah merdeka.

Gejala yang tidak sehat itu juga merambah ke pembentukan akronim. Semua nama dibuat akronim untuk memudahkan pengucapan, hasilnya banyak kantor-kantor pemerintah diwarnai akronim. Kabid Rentakarya, Kapusbinsartek, Ditjen Runumgar Dep Hankam, Dirjen Binapenta, adalah contoh-contoh akronim yang cukup mengernyitkan dahi. Tidak jarang, saking seringnya memakai akronim, bentuk aslinya terlupakan.

Bila melihat paparan di atas, tampak bahwa tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia sesungguhnya berasal dari pemakainya sendiri. Keengganan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kerajinan memakai istilah asing serta menyingkat segala sesuatu, secara umum mencerminkan sikap kita sebagai suatu bangsa: suka berpura-pura dan gegabah. ■

DOK IDAYU



LINGGARJATI: Saat berlangsung perundingan Linggarjati, udara cukup sejuk.

Mengembalikan Peran Pesantren

AGUS KHASNIF

Staf Yayasan Kesejahteraan Umat (YAKU) Pesantren Wathoniyah Islamiyah, Petanakahon, Kebumen Jawa Tengah

Setelah Indonesia Merdeka, pesantren sebenarnya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Indonesia, jauh melebihi saat-saat perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Rasanya sangat berdosa, jika pengorbanan para pejuang yang tidak mengharapkan tanda jasa (*syuhada*) itu, tidak kita teruskan dengan mengisinya secara maksimal.

Sayangnya, dalam kenyataannya pesantren kini tidak bisa berbuat banyak. Walaupun lembaga pendidikan ini tumbuh bagaikan jamur, namun adanya seperti tidak adanya (*wujuduhu ka'adamih*).

Dengan kata lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang membangun ini, pengaruh pesantren hampir-hampir sudah tidak terasa. Peranan pesantren sekarang hanyalah sekadar pemberi justifikasi, atau sekadar mediator seperti dalam kasus mega proyek di Madura.

Hal ini bisa terjadi, tidak lain karena kualitas SDM yang dihasilkan memang tidak mampu memenuhi logika persaingan.

Padahal, sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia, keunggulan *sistem* pendidikan pesantren telah diakui oleh para ahli dari dalam dan luar negeri.

Karena itu jika produknya ternyata dianggap kurang bermutu, pasti ada sesuatu yang keliru dalam pengelolaan pesantren. Hanya saja, rasanya menja-

di tidak adil dan tidak fair kalau cuma para kyai atau pengelola pesantren saja yang harus "menanggung dosa" dari memburuknya kondisi pesantren.

Sekarang, setelah 50 tahun Indonesia Merdeka, "dosa" tersebut harus kita tebus bersama. ICMI, yang merupakan kumpulan para cendekiawan muslim, secara moral juga ikut bertanggung jawab.

Dari ICMI-lah diharapkan muncul gagasan-gagasan segar untuk menumbuh-kembangkan pesantren, sehingga SDM yang dihasilkan bisa memenuhi logika persaingan, tetapi tetap dalam kerangka *akhlaqul-karimah*.

Bagaimana membuat kurikulum yang berintegratif, yang memadukan ilmu umum dan agama, adalah salah satu PR yang hingga kini belum terpikirkan oleh pesantren.

Kurangnya tenaga ahli, kecilnya (kalau tidak boleh dikatakan tidak ada) subsidi dibanding sekolah umum, serta sarana dan prasarana yang jauh dari memadai adalah kendala nyata untuk meningkatkan kualitas pesantren.

Karena itu, di samping ICMI, Pemerintah Indonesia secara moral dan material juga ikut "menanggung dosa" atas kondisi pesantren tersebut.

Sudah selayaknya dan merupakan tindakan yang amat bijak, jika pemerintah sekarang lebih memperhatikan terhadap lembaga pendidikan asli Indonesia ini. Sebab jika sistem pesantren ini dikelola secara modern dan diberi fasilitas yang sepadan dengan sekolah umum, insya Allah hasilnya jauh lebih bagus. ■